

## Transformasi Perilaku Kelompok Radikal ke Moderat di Era Digital

Muhammad Sabiq<sup>1</sup>, Iskandar<sup>2</sup>, Andi Burhanuddin<sup>3</sup> Arisnawawi<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Sosiologi, Universitas Bosowa

E-mail: [muh.sabiq@universitasbosowa.ac.id](mailto:muh.sabiq@universitasbosowa.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Sosiologi, Universitas Bosowa

E-mail: [iskandar@universitasbosowa.ac.id](mailto:iskandar@universitasbosowa.ac.id)

<sup>3</sup> Program Studi Sosiologi, Universitas Bosowa

E-mail: [andibur.bosowa@gmail.com](mailto:andibur.bosowa@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Hasanuddin

E-mail: [arisnawawi@unhas.ac.id](mailto:arisnawawi@unhas.ac.id)

---

**Abstrak.** *This study examines the process of transformation of radical group behavior to become more moderate in the digital era. This study does not consider digital technology and social media as the only factors that influence someone to make decisions and join a radical group. This type of research is digital sociology research, with qualitative methods. Data were collected using library techniques. The theory used to analyze the data is the theory of social transformation of modern society. The findings of this study are: first, the number of Indonesian citizens exposed to radicalism is very large but continues to decline over time. Second, this radical group has begun to accept secularism, such as laws, the concept of the Republic of Indonesia, and Pancasila, and also uses products of modernity such as digital technology and social media. Third, the use of digital technology and social media causes a psychological phenomenon, known as depersonalization. This experience of depersonalization is strengthened by the individual's disappointment in their physical space, either due to family disharmony, disappointment with socio-political conditions, and others. The findings of this study contribute to the enrichment of the treasury of digital sociology and especially the study of depersonalization of radical ideology and terrorist groups.*

**Kata Kunci :** Transformation; Radicalism; Digital

---

**Abstract.** *Penelitian ini mengkaji proses transformasi perilaku kelompok radikal menjadi lebih moderat di era digital. Penelitian ini tidak menganggap teknologi digital dan media sosial sebagai satu-satunya faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan dan bergabung dalam kelompok radikalisme. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi digital, dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik kepustakaan. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori transformasi sosial masyarakat modern. Temuan penelitian ini adalah: pertama, jumlah warga Indonesia yang terpapar radikalisme sangat besar namun terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Kedua, kelompok radikal ini mulai menerima sekularisme, seperti undang-undang, konsep NKRI, serta Pancasila, dan juga menggunakan produk modernitas seperti teknologi digital dan media sosial. Ketiga, penggunaan teknologi digital dan media sosial menyebabkan fenomena psikologis, yang disebut sebagai depersonalisasi. Pengalaman depersonalisasi ini menguat karena kekecewaan individu dalam ruang fisiknya, baik karena ketidakharmonisan keluarga, kekecewaan kondisi sosial politik, dan lainnya. Temuan penelitian ini berkontribusi pada pengayaan khazanah sosiologi digital dan khususnya kajian depersonalisasi paham radikal dan kelompok teroris.*

**Keywords :** Transformasi; Radikalisme; Digital

---

## PENDAHULUAN

Internet pertama kali merupakan proyek penelitian Advanced Research Project Agency (ARPA) Department of Defense (DOD) Amerika Serikat pada tahun 1969. Versi pertama disebut ARPANET. Pada tahun 1980-an, ARPANET dibagi menjadi dua bagian: MILNET dan ARPANET. MILNET digunakan untuk kepentingan militer, dan ARPANET untuk kepentingan penelitian, pengembangan, dan sektor lain. Pada tahun yang sama, National Science Foundation (NSF) di Washington, D.C. mendistribusikan teknologi internet ke beberapa universitas, seperti Berkeley, MIT, Stanford, dan UCLA. Dari sana internet menyebar ke seluruh dunia (Simarmata, 2010).

Sementara Internet pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1988, ketika Universitas Indonesia (UI) mencatatkan sejarah dengan mendaftarkan protokol internet (IP) pertama di Tanah Air pada tanggal 24 Juni 1988. Protokol ini diberi kode UI-NETLAB 192.41.206/24, menandai langkah awal Indonesia dalam mengadopsi teknologi komunikasi global yang saat itu masih dalam tahap pengembangan di berbagai belahan dunia. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan digitalisasi Indonesia, meskipun pada saat itu, penggunaannya masih sangat terbatas pada kalangan akademisi dan peneliti. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk terlibat dalam transformasi teknologi yang tengah berkembang secara global, terutama di bidang riset dan pendidikan tinggi (IDN Times, 2020).

Namun, fondasi untuk menyambut era digital sebenarnya telah diletakkan lima tahun sebelumnya, pada tahun 1983, oleh BJ Habibie. Sebagai seorang teknokrat visioner, Habibie mencetuskan ide penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur pemerintahan yang lebih terintegrasi dalam mendukung riset dan inovasi. Hasil dari gagasan ini adalah pembentukan badan yang kelak dikenal sebagai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Meskipun membawa harapan besar, langkah ini juga menghadirkan berbagai tantangan, baik secara substansial maupun administratif. BRIN harus mampu menghadapi kompleksitas pengelolaan riset, keterbatasan sumber daya, dan tuntutan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Visi besar Habibie ini memberikan dorongan awal yang signifikan bagi Indonesia untuk bersaing di tengah arus globalisasi teknologi (Yuniarto, 2021).

Menghadapi kemunculan teknologi internet tersebut, kelompok radikal-teroris berbasis agama pun menghadapi tantangan yang sama. Misalnya, Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 1980-an, dipimpin oleh Abdurrahman Al-Baghdadi. Namun, baru pada tahun 2000, Hizbut Tahrir mendeklarasikan nama baru menjadi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2000. Menurut HTI, Indonesia adalah sasaran penting tegaknya khilafah. Untuk itulah, mereka menyelenggarakan Konferensi Khilafah Internasional pertama pada 28 Mei 2000 dan konferensi kedua pada 12 Agustus 2007 (Amin, 2012).

Pada tanggal 19 Juli 2017, pemerintah Indonesia secara resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pembubaran ini didasarkan pada penilaian bahwa visi, misi, dan aktivitas HTI bertentangan dengan prinsip Pancasila, ideologi negara yang menekankan persatuan dalam keberagaman. Perppu tersebut memberikan dasar hukum untuk membubarkan organisasi yang dianggap mengancam kedaulatan dan keutuhan negara. Langkah ini juga mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menangkal ancaman ideologi transnasional yang berpotensi memecah belah bangsa. Pembubaran HTI menandai salah satu babak penting dalam sejarah upaya Indonesia mempertahankan nilai-nilai dasar negara dari pengaruh gerakan yang dinilai radikal (detikNews, 2020).

Sebelum pembubarannya, HTI telah memanfaatkan teknologi digital secara intensif untuk menyebarkan propaganda mereka. Media sosial, terutama Twitter, menjadi salah satu platform utama yang mereka gunakan untuk membangun narasi dan memobilisasi opini publik. Dengan menggunakan tagar seperti #WeNeedKhilafah, #DemokrasiSistemKufur, dan #KhilafahAjaranIslam, HTI berhasil menciptakan wacana-wacana yang menarik perhatian khalayak luas, terutama generasi muda. Selain itu, HTI sering mengangkat isu-isu global yang menyentuh sentimen umat Islam, seperti

konflik Israel-Palestina, penderitaan Muslim Rohingya, dan pelanggaran hak asasi terhadap Muslim Uighur. Strategi ini bertujuan untuk menarik simpati dan dukungan, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional, sambil mengokohkan posisi mereka sebagai salah satu aktor utama dalam diskursus politik Islam global (Setia, 2021).

Pengalaman serupa juga dialami oleh kelompok radikal lain, yaitu Front Pembela Islam (FPI). Organisasi ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al-Umm, Ciputat, Tangerang Selatan, dengan tujuan awal untuk membela Islam dari berbagai bentuk penistaan, setidaknya menurut klaim mereka. Namun, FPI kemudian dikenal luas sebagai organisasi yang kerap menggunakan aksi demonstrasi besar-besaran dan pendekatan yang dinilai konfrontatif dalam menyuarakan agendanya. Pada 30 Desember 2020, pemerintah Indonesia resmi membubarkan FPI, dengan alasan bahwa visi dan misi organisasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berlaku. Selain itu, FPI juga tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang sah karena masa berlakunya telah habis sejak 20 Juni 2019. Keputusan ini mencerminkan sikap tegas pemerintah terhadap organisasi yang dianggap melanggar hukum dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kebangsaan (Tempo, 2023).

Sebelum pembubarannya, FPI dikenal aktif memanfaatkan teknologi informasi untuk menggalang dukungan publik. Salah satu contoh paling mencolok adalah keterlibatan mereka dalam memobilisasi massa melalui gerakan "Kelompok Islam 212" yang muncul pada tahun 2016. Gerakan ini menggunakan berbagai platform media sosial dan teknologi digital untuk menyebarkan informasi, mengorganisir aksi, serta membangun solidaritas di kalangan umat Islam. Puncak mobilisasi terjadi pada 2 Desember 2016, melalui kegiatan yang dikenal sebagai Aksi Bela Islam (ABI). Demonstrasi ini berhasil menarik perhatian nasional dan internasional, dengan jumlah peserta yang mencapai ratusan ribu orang. Peran teknologi digital dalam aksi-aksi FPI menyoroti bagaimana media sosial dapat menjadi alat yang ampuh untuk memobilisasi opini publik secara masif dan terorganisir, sekaligus menegaskan kompleksitas tantangan dalam menghadapi penyebaran ideologi radikal di era digital (Muharam et al., 2023).

Berdasarkan kasus-kasus di atas, kehadiran internet dan teknologi digital tidak dapat dipahami secara sederhana atau monolitik. Selama ini, teknologi internet sering dipersepsikan sebagai tantangan utama globalisasi yang membawa dampak negatif, termasuk penyebaran paham radikalisme. Internet menjadi salah satu medium utama yang memfasilitasi penyebaran ideologi radikal melalui platform seperti media sosial (Annissa & Putra, 2021). Dalam konteks ini, radikalisme berbasis agama memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarluaskan propaganda, merekrut anggota baru, dan membangun jaringan global. Ketika tantangan ini tidak dikelola dengan baik, media sosial dan platform digital lainnya justru berperan sebagai katalisator penyebaran ideologi yang berpotensi mengancam stabilitas sosial. Narasi kebencian, provokasi, dan ajakan untuk bertindak ekstrem dapat dengan cepat menyebar, melintasi batas geografis dan demografis, menjadikan teknologi digital sebagai alat ampuh bagi kelompok radikal (Putra et al., 2024).

Namun demikian, tidak semua penggunaan teknologi digital mengarah pada hasil yang destruktif. Di sisi lain, internet juga menyediakan peluang besar untuk melawan penyebaran radikalisme melalui upaya deradikalisasi dan kontra-narasi. Kampanye deradikalisasi yang dilakukan melalui media sosial menawarkan harapan baru untuk membangun kesadaran publik akan bahaya ideologi radikal. Pendekatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, hingga individu, dalam memproduksi konten yang mendorong nilai-nilai moderasi dan toleransi (Tawaang & Mudjiyanto, 2021). Narasi-narasi positif yang dikembangkan melalui media sosial bertujuan untuk menggantikan narasi kebencian dengan pesan-pesan inklusif, damai, dan berlandaskan pada semangat kebangsaan. Dengan demikian, teknologi digital dapat menjadi alat yang tidak hanya memerangi radikalisme tetapi juga membangun harmoni sosial yang lebih kokoh.

Media sosial tidak hanya berperan sebagai katalisator dalam kontra narasi radikalisme, tetapi juga menjadi wadah penting untuk mengampanyekan gagasan moderasi yang relevan bagi masyarakat, terutama generasi muda. Generasi Z, yang tumbuh di tengah pesatnya perkembangan

teknologi digital, memiliki akses yang luas terhadap informasi dan berbagai narasi yang beredar di media sosial. Oleh karena itu, media sosial menjadi alat strategis dalam menyampaikan pesan-pesan moderasi (Sabiq et al., 2022). Kampanye moderasi melalui platform digital ini dirancang untuk membentuk pola pikir kritis generasi muda agar lebih selektif terhadap informasi yang mengandung unsur provokasi atau radikalisme (Rahmawati et al., 2023). Contohnya, di Sulawesi Tenggara, upaya moderasi yang dilakukan dengan memanfaatkan media digital terbukti efektif dalam mencegah generasi muda terpapar paham radikal. Program ini berhasil memberikan edukasi yang terarah dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik generasi digital (Sarlan, 2021). Di sinilah, semangat moderasi bisa ditransformasikan melalui media digital (Mandala et al., 2024).

Mengingat potensi besar teknologi digital dan media sosial dalam melawan penyebaran radikalisme melalui strategi deradikalisasi dan kontra-narasi, sehingga penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Teknologi digital saat ini bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi telah menjadi ruang interaksi yang dinamis, mampu membentuk pola pikir, perilaku, dan nilai-nilai sosial masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia, yang dikenal dengan keberagamannya, memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan nilai-nilai moderasi dan toleransi menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga harmoni sosial.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, seperti Wilbowo & Hadiningrat (2022) yang berjudul *Penanggulangan Penyebaran Radikalisme melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia* yang lebih menitikberatkan pada pendekatan hukum pidana dalam menangani penyebaran radikalisme di media sosial, serta Diniaty et al. (2021) yang berjudul *Penggunaan Media Sosial dan Pemahaman tentang Radikalisme di Kalangan Pelajar* mengkaji hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan tingkat pemahaman pelajar tentang radikalisme, kajian ini menawarkan pendekatan inovatif. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana narasi moderasi berbasis digital dapat digunakan secara strategis untuk mentransformasi perilaku kelompok radikal menjadi lebih moderat. Pendekatan ini memberikan solusi yang lebih proaktif, inklusif, dan berorientasi pada pencegahan dibandingkan sekadar pendekatan represif atau peningkatan kesadaran.

Selain itu, generasi muda yang merupakan pengguna utama media sosial menjadi target yang sangat strategis. Mereka tidak hanya rentan terpapar radikalisme, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam membangun narasi moderasi. Dengan menggali bagaimana platform digital dapat secara efektif digunakan untuk mendorong transformasi perilaku kelompok radikal ke arah yang lebih moderat, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam menjawab tantangan era digital. Kajian ini juga relevan dalam membentuk strategi kebijakan nasional yang berbasis pada pembangunan kesadaran digital, nilai-nilai toleransi, moderasi, dan kebangsaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi pengembangan program edukasi digital yang lebih inklusif, efektif, dan mampu melindungi masyarakat dari ancaman ideologi yang merusak, sehingga mendukung terciptanya masyarakat digital yang harmonis dan berdaya saing di era globalisasi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi digital, di mana perkembangan teknologi digital terbaru akan selalu memberikan pengaruh luar biasa terhadap perilaku hidup sehari-hari, termasuk hubungan sosial, pemerintahan, dan lainnya (Lupton, 2014). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang sepenuhnya bergantung pada data kualitatif (Maxwell, 2008). Data kualitatif dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik kepustakaan (Kuhlthau, 1994). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan antara perkembangan teknologi digital dan transformasi sosial (Markus & Nan, 2020). Dengan pendekatan ini, peneliti akan memberikan fokus pada hubungan antara penggunaan teknologi digital dengan perubahan perilaku sosial masyarakat, terutama kelompok radikal di Indonesia.

Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori transformasi sosial masyarakat modern, dimana peran teknologi digital betul-betul berpengaruh dalam mengubah interaksi sosial. Teori ini melihat bahwa teknologi digital seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, keberadaan teknologi digital meningkatkan kuantitas relasi sosial. Namun, di sisi lain, teknologi digital juga

melakukan depersonalisasi. Proses depersonalisasi ini mengubah keyakinan dan standar penilaian manusia, yang semula didasarkan pada intensitas hubungandengan sesama manusia menjadi ketergantungan penuh terhadap data dan informasi (Hanandini, 2024).

Masyarakat digital yang mengalami depersonalisasi tidak saja bergantung pada data tetapi juga ketergantungan tersebut membentuk fenomena virtualitas dalam diri dan kesadaran manusia. Ide depersonalisasi digital ini adalah kerangka untuk memahami kesadaran diri yang diperluas oleh virtualitas di dunia maya atau digital. Pada gilirannya, manusia akan memiliki kesadaran bertumpuk, dimana keberadaan eksistensial (*Existential Dasein*) dibarengi dengan keberadaan digital (*Digital Design*). Dengan kata lain, Diri Virtual yang dihasilkan teknologi digital melengkapi Diri Kognitif yang dihasilkan pengalaman empiris (Bezzubova, 2020).

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik Miles & Huberman (1994). Pertama-tama, peneliti akan mengumpulkan data yang terkait dengan perilaku kelompok radikal di dunia maya. Selanjutnya, peneliti akan mensortir dan memfokuskan pada data yang dapat digunakan untuk menjawab pokok persoalan penelitian, yaitu transformasi perilaku. Setelah itu, peneliti akan melakukan analisis dan penyajian, untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas tentang pokok persoalan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Temuan

#### a. Kelompok Radikal dan Media Sosial

Pola organisasi kelompok radikal di Indonesia cukup beragam. Sebagian dari mereka bergerak di bidang moral, sehingga tampak sebagai gerakan moral ideologis. Kelompok yang termasuk dalam kategori ini antara lain: Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Sebagian lain bergerak dengan gaya militeristik. Kelompok radikal militeristik ini antara lain: Hizbut Tahrir Indonesia, Laskar Jihad, Front Pembela Islam, dan Front Pemuda Islam Surakarta (BKPSDMD, 2018).

Dari segi afiliasi di tingkat internasional, kelompok radikal di Indonesia juga dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kelompok yang disumpah oleh pemimpin ISIS secara langsung, dan kedua, kelompok yang mendukung gerakan ISIS secara tidak langsung. Kelompok dalam kategori pertama itu antara lain: Mujahideen Indonesia Barat, Mujahideen Indonesia Timur, Jamaah Tawhid Wal Jihad, Forum Aktivistis Syariah Islam, Pendukung dan Pembela Daulah, Gerakan Reformasi Islam, Asybal Tawhid Indonesia, Kongres Umat Islam Bekasi, Umat Islam Nusantara, Ikhwan Muwahid Indunisy Fie, Jazirah Al-Muluk Ambon, Ansharul Kilafah Jawa Timur, Gerakan Tawhid Lamongan, Khilafatul Muslimin, Laskar Jundullah, dan DKM Masjid Al Fataa. Sementara kelompok yang mendukung ISI secara tidak langsung antara lain: RING Banten, Jamaah Ansharut Tauhid, dan Halawi Makmun Group (BKPSDMD, 2018).

Jumlah media sosial yang digunakan oleh kelompok-kelompok radikal di Indonesia sangat banyak. Mereka juga melakukan propaganda dan menyebarkan narasi secara massif. Misalnya, pada tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kominfo) berhasil memblokir 1,500 situs dan akun media sosial yang berkonten radikalisme dan terorisme (Komdigi, 2019). Jumlah ini ikut serta meningkatkan jumlah penggunaan media sosial sebagai media propaganda. Dengan begitu, terhitung sejak 2017 hingga 2020, Kominfo mencatat telah ada 16,739 konten yang diblokir, dengan rincian 11,600 Facebook, 2,282 Twitter, 678 YouTube, 496 situs website, dan 1,000 *file sharing* (Rizkinaswara, 2020).

Angka terus meningkat. Hal itu terlihat dari data per 3 April 2021. Kominfo telah memblokir 20,543 konten radikalisme dan terorisme di berbagai situs internet dan media sosial (Rizkinaswara, 2021). Kemudian, sepanjang tahun 2022, BNPT RI, Polri, dan Kominfo bekerjasama untuk menutup 470 situs dan akun (Saptohutomo, 2022). Dengan kata lain, jumlah situs yang diblokir lebih sedikit dari pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, per Agustus 2023, Kominfo telah memblokir sebanyak 273 situs (Sandi, 2023). Dengan angka itu, maka sejak 7 Juli 2023 hingga 21 Maret 2024 terhitung ada 5,731 konten yang sudah diblokir. Alasan pemerintah sederhana, karena situs dan akun tersebut



mengandung paham ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme, di berbagai platform media digital (Komdigi, 2024).

#### **b. Perilaku Kelompok Radikal di Media Sosial**

Persentuhan kelompok radikal dengan media sosial dimulai dari keinginan untuk belajar agama dari sumber-sumber internet. Pada tahun 2018, Pusat Pengkajian dan Masyarakat Islam (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah membuktikan hal itu. Riset PPIM tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar 58% mereka mengakses belajar agama secara online. Dibandingkan melalui guru, membaca buku langsung, atau mengikuti pengajian, mereka lebih cenderung untuk belajar agama secara online. Masalahnya, internet didominasi oleh paham Islam konservatis literalis. Seorang mantan radikal, Nurshadrina Khaira Dhaniala, menceritakan pengalamannya pada tahun 2015, ketika dirinya terpengaruh oleh bacaan keagamaan di internet, sehingga memutuskan untuk meminta seluruh anggota keluarganya pindah ke Suriah, setelah ISIS mengkampanyekan kehidupan baru di negeri Islam (Suchyo, 2021).

Tidak saja soal belajar agama, perilaku radikalisme di media sosial juga dipengaruhi oleh perubahan faktor sosial-politik. Orang-orang berperilaku radikal di dunia maya disebabkan oleh perbedaan afiliasi politik mereka masing-masing, dan aspirasi mereka yang berbeda. Hal itu misalnya terjadi pada tahun 2018, menjelang pemilihan umum 2019. Banyak pengguna media sosial menggunakan tagan (#) untuk berinteraksi satu sama lain di antara sesama pengguna. Beberapa tagar yang bernuansa politik tersebut antara lain: #radikalisme, #indonesia, #pancasila, #indonesiadamai, #indonesiahebat, #2019gantipresiden, #jokowi2periode, #intoleransi, #jokowimakruf2019, dan #bhinnekatunggalika. Tingkat interaksi sosial di media digital dapat dilihat dari jumlah penyebutan, likes, shares, comments, dan keterjangkauan (reach). Misalnya, pada 29 Agustus 2018, akun Reaksirakyat1 mengunggah video yang paling mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat, mendapatkan 4,109 likes dan 830 komentar (Wahid et al., 2020).

Perbedaan aspirasi politik, preferensi keagamaan, diperparah oleh kenyataan lain bahwa media sosial memberikan ruang kebebasan yang seluas-luasnya, sehingga berbeda dari media jurnalistik yang memiliki aturan pakem yang wajib dipenuhi. Kebebasan berekspresi yang ditawarkan oleh media sosial memberikan ruang bagi para penggunanya untuk lebih mengungkapkan sudut pandang masing-masing, sehingga kerap terjadi kebablasan dan tidak menghargai posisi orang lain. Paham radikalisme secara halus dan pelan-pelan menyusup ke dalam kesadaran pengguna media sosial yang tidak dibekali oleh kritisisme. Mereka mudah terpengaruh oleh informasi hoaks, dan mudah mengomentari apapun sesuai preferensinya sendiri-sendiri, bukan karena semata-mata informasi yang didapat melainkan juga karena kapasitas personal yang kurang kritis. Dengan kata lain, media sosial pada hakikatnya merupakan medium yang netral. Sementara para pengguna mempunyai kepentingan dan preferensi tertentu. Padahal, seluruh orang memiliki kepentingan sesuai kadar nalar masing-masing (UMA, 2022).

#### **c. Penerimaan Kelompok Radikal terhadap Sekularisasi**

Teknologi digital, dan terutama media sosial, bagaimana pun adalah produk modernitas. Penggunaan media digital dalam rangka menyebarkan keyakinan beragama, termasuk paham radikalisme, sejatinya merupakan bentuk sikap penerimaan terhadap sekularisme. Semula, orang-orang radikal menolak terhadap semua produk modernitas, termasuk internet dan teknologi digital. Mereka beranggapan bahwa kemajuan tidak dicapai dengan kembali pada sains dan teknologi, sebaliknya kembali kepada pemahaman keagamaan yang benar. Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi, misalnya, pernah mengatakan bahwa kita tidak akan maju dalam bidang sains, teknologi, ekonomi, dan kemasyarakatan kalau tidak kembali kepada pemahaman Salaf. Sebab, dengan kembali pada pemahaman Salaf, berarti telah memahami agama ini dengan benar dan menolong agama Allah dengan benar pula, serta jauh dari khurafat, syirik, bid'ah, dan maksiat (Al-Halabi, 2004).

Namun, pemahaman yang menolak secara radikal terhadap sains dan teknologi tersebut tidak bisa diterima sepenuhnya oleh kelompok radikal lainnya. Sebaliknya, sebagian dari mereka ikut memberikan perhatian khusus terhadap masalah teknologi digital dan media sosial ini. Mereka juga

menerima penggunaan undang-undang positif yang mengatur kehidupan bernegara. Misalnya, pada tahun 2011, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) melakukan audiensi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Pemerintah Kota Solo, untuk membahas konten pornografi di internet, pornografi di media cetak, serta game online. Mereka menuntut pemerintah mengambil tindakan nyata untuk menerapkan Undang-Undang tentang Pornografi yang sudah ada sejak 2008 (Espos, 2011).

Selain memiliki sikap penerimaan terhadap Undang-Undang, kelompok radikal juga mengusung konsep bela negara. Hal itu dilakukan salah satunya oleh Front Pembela Islam (FPI) yang pernah bekerjasama dengan TNI. Ketua FPI, Habib Rizieq, mengatakan bahwa bela negara adalah sebuah kewajiban, karena anggota FPI juga bagian dari warga negara (KumparanNews, 2017). Bahkan, untuk menghadapi kehidupan masa depan yang tak terpisahkan dari teknologi digital, kelompok radikal lainnya juga menyelenggarakan pelatihan cerdas digital. Hal itu terlihat dari kegiatan Lajnah Muslimah Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), yang menyelenggarakan pelatihan media bagi perwakilan zonasi yang berada di 5 Kecamatan Kota Solo. Kegiatan tersebut mengangkat tema "Emakku Cerdas Media". Mereka juga mengajarkan jurnalistik tentang teknik dasar penulisan berita yang meliputi 5W + 1H (Muda, 2023).

#### **d. Berkurangnya Jumlah Pendukung Radikalisme Secara Kuantitatif**

Penerimaan terhadap produk modernisme dan sekularisme adalah penurunan jumlah pendukung kelompok ini. Orang-orang yang sebelumnya terpapar oleh paham radikalisme mulai memiliki kesadaran kritis tentang arti penting dari modernisme dan sekularisme. Dengan begitu, mereka secara tidak sadar telah menerima pula terhadap nilai-nilai moderat yang diperjuangkan oleh muslim moderat Indonesia. Secara grafik, angka penurunan radikalisme terjadi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, misalnya, angka radikalisme berada pada 55,2%, kemudian menurun menjadi 38,4% pada tahun 2019, dan menjadi 14% pada tahun 2020. Hal itu tidak lain disebabkan oleh pembatasan penggunaan media sosial, yang mudah ditunggangi propaganda kelompok radikal. (Putra et al., 2024).

Penurunan angka penganut paham radikalisme terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Hal itu bisa dilihat pada perkembangan yang terjadi di tahun 2022. Menurut Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), jumlah penduduk Indonesia yang terpapar paham radikalisme pada tahun 2022 sebesar 33 juta. Angka ini adalah hasil akhir setelah terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, angka jumlah radikal menurun dari angka 38,4%. Akhirnya, dalam rentang waktu 2020-2021, angka kembali turun lagi hingga tersisa 12,2% (Majid, 2022).

Dengan angka yang mulai mengecil, yaitu 12,2% atau 33 juta jiwa pada 2021, prestasi indeks global Indonesia pun meningkat. Hal itu tidak lepas dari angka penduduk Indonesia yang terpapar radikalisme terus menurun. Salah satunya terlihat pada tahun 2023, dimana Indonesia sudah masuk dalam kategori negara sebagai *Medium Impacted by Terrorism*. Kemudian, prestasi ini terus naik pada tahun 2024 sekarang. Indonesia sudah dinobatkan sebagai negara dengan kategori *Low Impacted by Terrorism*. Indonesia yang semula berada di peringkat ke-31 kini menjadi berada di peringkat ke-7 dari urutan 24. Hal itu sebagaimana hasil penilaian dari *Global Terrorism Index 2024* (BNPT, 2024).

Beberapa kelompok radikal juga dengan sukarela membubarkan diri. Hal itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ketika HTI dibubarkan secara sengaja oleh pemerintah pada tahun 2017 dan FPI dibubarkan semi terpaksa, karena izin operasionalnya tidak dapat diperpanjang, maka beberapa kelompok radikal beberapa tahun terakhir ini membubarkan diri secara suka rela. Pada 30 Juni 2024, Al-Jamaah Al-Islamiah (JI) sebagai kelompok radikal-teroris menyatakan membubarkan diri. Pembacaan deklarasi pembubaran diri tersebut dipimpin oleh Petinggi JI, Abu Rusydan, di kawasan Bogor (Hukuma, 2024).

Sebelumnya, pada 12 Juli 2022, kelompok radikal lainnya, Khilafatul Muslimin, juga mendeklarasikan pembubaran diri dan menyatakan setia kepada NKRI. Sejumlah anggota Khilafatul

Muslim Kota Cirebon mengikuti deklarasi pembubaran diri itu, dengan dihadiri Forkompimda Kota Cirebon. Mereka tidak saja membacakan deklarasi melainkan juga menandatangani ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penandatanganan disaksikan oleh Kemenag Kota Cirebon, FKUB, MUI dan lainnya (Baehaqi, 2022).

## 2. Pembahasan

### a. Depersonalisasi Sebagai Pengaruh Teknologi Digital

Realitas virtual dapat menimbulkan simtom depersonalisasi dan deralisasi. Depersonalisasi dan derealisasi adalah masalah psikologis, atau simtom ketidaknyamanan setelah mengkonsumsi realitas virtual. Selain itu, ciri-ciri kepribadian juga dipengaruhi oleh realitas virtual ini, walaupun sifatnya cukup sementara (Peckmann et al., 2022). Penelitian psikologis ini juga terjadi pada penganut paham radikalisme yang telah lama bersentuhan dengan dunia digital, dan kemudian mulai mendapatkan ketidaknyamanan terhadap apa yang dikonsumsinya. Dengan begitu, kemudian mereka memilih untuk meninggalkannya. Sebuah diseminasi hasil penelitian antara Indonesia Muslim Center (IMCC), PPM UIN Syarif Hidayatullah, dan UNDP menyebutkan bahwa mereka yang kecewa terhadap kelompoknya lebih mudah untuk mengikuti program deradikalisasi. Sementara mereka yang belum kecewa masih berpegang teguh pada keyakinan kelompoknya (Rhio, 2018).

Tidak hanya kekecewaan terhadap kelompoknya, melainkan yang terjadi juga adalah kekecewaan terhadap informasi yang didapat dari internet. Pada tahun 2017, sebanyak 16 orang WNI yang terdiri dari kaum perempuan dan anak-anak diketahui berada di kamp pengungsi di Ain Issa, 60 km dari kota Raqqa, Suriah. Sebelumnya, mereka tinggal di Raqqa, yang diklaim sebagai ibukota negara Islam atau ISIS. Mereka mengaku meninggalkan Indonesia karena tertarik dengan ideologi dan bantuan ekonomi yang ditawarkan kelompok militan ISIS. Namun, mereka mengaku kecewa dan merasa dibohongi janji-janji ISIS melalui internet (Affan, 2017). Kekecewaan terhadap janji-janji manis ISIS di internet alias dunia maya melengkapi fenomena kekecewaan yang terjadi di ruang fisik.

Di antara 16 WNI yang pergi ke Suriah karena propaganda ISIS di internet adalah seorang perempuan bernama Nur yang berusia 19 tahun. Nur mengaku pindah ke Suriah setelah melihat foto dan video tentang negara Islam yang diunggah ISIS ke internet. Namun kemudian, Nur mengaku bahwa semua propaganda ISIS tersebut bohon. Ketika memasuki wilayah ISIS, yang terlihat berbeda dari apa yang mereka katakan di internet (BBC, 2017).

Sebuah penelitian memang menunjukkan bahwa akses perempuan ke internet jauh lebih banyak dari pada laki-laki. Siklus hidup perempuan ini bisa dibagi ke dalam beberapa sektor; pertama, mereka membangun jaringan sosial, keluarga, atau teman yang biasanya berperan dalam mengambil keputusan individual untuk terlibat dalam jaringan terorisme. Kedua, media digital secara khusus memungkinkan perempuan untuk memperluas interaksi sosial mereka melampaui apa yang mungkin diinginkan secara langsung di dunia nyata. Sehingga rekrutmen melalui jalur virtual lebih banyak memengaruhi kaum perempuan (Parvez & Hastings, 2022).

Selain itu, fenomena kekecewaan, baik di dunia maya maupun dunia nyata, merupakan simtom depersonalisasi, yaitu suatu penyakit mental dimana seseorang lebih condong menggunakan pikirannya tanpa mempertimbangkan perasaannya (Phillips et al., 2001). Meninggalkan tanah air dan keluarga besar di Indonesia untuk mengejar janji dan mimpi yang ditawarkan oleh propaganda ISIS di luar negeri adalah tindakan yang tidak berperasaan. Tindakan yang tidak berperasaan semacamini juga menunjukkan adanya masalah keluarga yang tidak terselesaikan. Sebab, segala bentuk keharmonisan keluarga, saling mencintai, saling menghormati, saling mempercayai, sehingga masing-masing mendapatkan tempatnya dengan terhormat adalah ciri-ciri dari keluarga harmonis (Munandar et al., 2020).

Kehidupan keluarga yang harmonis tidak akan mendorong seseorang mengambil pilihan berisiko tinggi. Sebaliknya, peran keluarga juga sangat besar dalam mencegah radikalisme sejak dini (Sporer & Buxton, 2024). Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susianah Affandy,



meminta masyarakat memperkuat ketahanan keluarga untuk mencegah gerakan terorisme menyasar anak-anak. Ketahanan keluarga adalah kunci utama pencegahan dini terorisme. Misalnya, pelaku bom bunuh diri dan mereka yang terlibat dalam gerakan radikal dan terorisme adalah mereka yang memiliki latar belakang keluarga yang tidak harmonis (Tamrin et al., 2021), keluarga miskin, dan rentan. Ketika pendidikan dan pengetahuan kekerasan diajarkan di rumah maka kelak dewasa akan menyelesaikan masalah juga dengan kekerasan (RiauPos, 2017).

Dengan demikian, besarnya jumlah penganut paham radikal merupakan fenomena depersonalisasi (Sabiq et al., 2023), ketika seseorang lebih didominasi oleh perasaan kecewa terhadap lingkungannya, dan kemudian memiliki bayangan akan kehidupan yang lebih layak. Propaganda kelompok radikal dan teroris pada dasarnya adalah tentang janji-janji manis yang menawarkan mimpi indah (Aksyar & Arisnawawi, 2024). Seperti gayung bersambung, orang-orang yang sedang dilanda kekecewaan terhadap hidupnya sendiri dan menemukan mimpi indah yang dibayangkan, mereka pasti mudah untuk direkrut. Sementara media digital, seperti media sosial, pada dasarnya hanya perangkat yang bersifat netral. Tidak ada yang bisa diberikan oleh media sosial, internet, dan teknologi komunikasi apapun selain banjirnya arus informasi.

Hanya saja, ketika informasi ini didominasi oleh proganda kelompok radikal dan diterima oleh mereka yang mengalami simtom depersonalisasi, maka proses radikalisasi dan terorisme menjadi lebih mudah. Dalam konteks inilah, peran keluarga untuk menciptakan suasana yang harmonis merupakan faktor utama pencegahan dini penyebaran radikalisme dan terorisme. Keluarga yang gagal menciptakan situasi dan kondisi saling mencintai, saling menghormati, saling mempercayai, dapat berubah menjadi katalisator depersonalisasi. Pada akhirnya, keluarga yang berantakan menjadi faktor utama mendorong seseorang mengalami depersoanlisasi dan melarikan diri ke dalam realitas virtual untuk mencari tempat pelarian. Kelompok radikal dan teroris ini menawarkan mimpi manis semacam itu, sekalipun pada faktanya berbeda.

Depersonalisasi sebagai sikap yang lebih mendahulukan berpikir dari pada merasa, pada akhirnya, dapat berubah ketika skala terbaliknya tersentuh, yaitu ketika perasaannya disadarkan (Saloom, 2016). Hal itu pula yang terjadi pada beberapa kasus yang disebutkan sebelumnya. Ketika orang-orang Indonesia mengalami kekecewaan di Suriah, mereka pun kembali ke pikiran awal, dimana kehidupan di Indonesia disadari sebagai kehidupan yang lebih baik. Mereka pun berbalik menjadi pembela Islam yang lebih moderat. Hal yang sama juga bisa dilihat pada beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Jam'iyah Islamiyah (JI) dan Khilafatul Muslimin. Para pengikutnya telah mendeklarasikan pembubaran diri dan berjanji pula untuk setia kepada NKR, Pancasila, dan UUD 1045.

Dunia yang mengalami depersonalisasi sebenarnya juga membuka peluang untuk menciptakan komitmen sosial (Lawler et al., 2009). Komitmen untuk kembali ke NKRI, Pancasila, dan UUD adalah sebuah komitmen yang dilahirkan oleh dunia yang sebelumnya mengalami depersonalisasi. Mereka yang kecewa berjanji untuk tidak mengulangi kekecewaan mereka untuk kedua kalinya. Sebaliknya, mereka berkomitmen untuk menjadi lebih baik, dengan tidak lagi tertipu pada propaganda kelompok-kelompok radikal dan teroris. Oleh karenanya, mereka yang belum kecewa kepada kelompoknya maka mereka akan tetap memiliki keyakinan yang radikal. Tetapi, mereka yang sudah kecewa pasti akan kembali pada pilihan hidup sebelumnya.

Selama proses memunculkan depersonalisasi terhadap kelompok radikal ini, maka media massa menjadi medan perang baru antara narasi moderat dan narasi radikal. Pengarusutamaan narasi moderasi beragama melalui media sosial pun dapat menjadi langkah paling efektif menangkalkan penyebaran radikalisme (Ni'mah, 2022). Peran media massa untuk menyebarluaskan paham moderat sebagai langkah menangkalkan narasi radikalisme hanya terjadi paska seseorang mengalami dunia yang didepersonalisasi. Dengan kata lain, narasi itu tidak akan berpengaruh maksimal bagi mereka yang belum mengalami depersonalisasi.

## KESIMPULAN

Transformasi perilaku kelompok radikal menjadi lebih moderat pada era digital adalah fenomena yang kompleks. Tidak serta merta sebagai kemenangan propaganda narasi moderasi

untuk menangkal narasi radikalisme. Sebaiknya, proses moderasi itu harus ditopang oleh pengalaman depersonalisasi, yang dirasakan langsung oleh para pelaku radikalisme. Namun begitu, peran media massa atau digital secara umum tetaplah netral. Selama dominasi dimenangkan oleh narasi moderasi maka narasi radikalisme akan tenggelam. Hanya saja, hal itu merupakan satu faktor di antara faktor lain yang jauh lebih penting, yaitu pengalaman depersonalisasi.

Untuk itulah, proses menciptakan depersonalisasi kelompok radikal adalah perkara yang jauh lebih penting, karena hal itu meniscayakan keterlibatan rasa dan pikiran dari para pelaku radikalisme. Bukan sesuatu yang bisa dipaksakan secara eksternal. Jika tidak maka pemberantasan radikalisme dan terorisme hanya akan terus-menerus dilakukan secara paksa, bukan tumbuh dari kesadaran internal mereka. Untuk itulah, penelitian selanjutnya sangat dianjurkan untuk mendalami proses depersonalisasi para pelaku terorisme dan radikalisme ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affan, H. (2017). *WNI yang bergabung ISIS, Indonesia "tidak bisa tolak deportasi."* Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40430349>
- Aksyar, M., & Arisnawawi. (2024). Persepsi Mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus Terhadap Radikalisme di Universitas Tadulako: Students' Perceptions of Campus Dakhwa Institution Against Radicalism at Tadulako University. *Journal of Marginal Social Research*, 1(1), 43–50.
- Al-Halabi, S. A. bin H. bin A. A. H. (2004). *Bermanhaj Salaf Menghambat Kemajuan?* Almanhaj.or.Id. <https://almanhaj.or.id/7801-bermanhaj-salaf-menghambat-kemajuan.html>
- Amin, A. R. (2012). *Membongkar proyek khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia.* LKiS.
- Annissa, J., & Putra, R. W. (2021). Radikalisme dalam Media Sosial sebagai Tantangan di Era Globalisasi. *Propaganda*, 1(2), 83–89. <https://doi.org/10.37010/prop.v1i2.279>
- Baehaqi, A. I. (2022). *Anggota Khilafatul Muslimin Kota Cirebon Deklarasi Bubarkan Diri dan Berikrar Setia kepada NKRI.* Cirebon.Tribunnews.Com. <https://cirebon.tribunnews.com/2022/07/12/anggota-khilafatul-muslimin-kota-cirebon-deklarasi-bubarkan-diri-dan-berikrar-setia-kepada-nkri>
- BBC. (2017). *WNI di Raqqa: Yang dipropagandakan ISIS "semuanya bohong."* Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40288296>
- Bezubova, E. (2020). Virtual self and digital depersonalization: between existential dasein and digital design. *Mind and Matter*, 18(1), 91–110.
- BKPSDMD. (2018). *Gerakan Radikalisme Tumbuh Subur Tanpa Henti Di Indonesia.* Bkpsdmd.Babelprov.Go.Id. <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/gerakan-radikalisme-tumbuh-subur-tanpa-henti-di-indonesia>
- BNPT. (2024). *BNPT : Tahun 2024 Posisi Indonesia dalam GTI Masuk Kategori Negara Low Impacted by Terrorism.* Bnpt.Go.Id. <https://www.bnpt.go.id/bnpt-tahun-2024-posisi-indonesia-dalam-gti-masuk-kategori-negara-low-impacted-by-terrorism>
- detikNews. (2020). *2 Organisasi Terlarang di Era Jokowi: HTI dan FPI.* News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5315098/2-organisasi-terlarang-di-era-jokowi-hti-dan-fpi>
- Diniaty, A., Susilawati, S., Zarkasih, Z., & Vebrianto, R. (2021). Penggunaan Media Sosial Dan Pemahaman Tentang Radikalisme Di Kalangan Pelajar Muslim. *Jurnal Psikologi*, 17(1), 70. <https://doi.org/10.24014/jp.v17i1.10897>
- Espos. (2011). *MMI audiensi ke Diskominfo soal konten pornografi.* News.Espos.Id. <https://news.espos.id/mmi-audiensi-ke-diskominfo-soal-konten-pornografi-238405>
- Hanandini, D. (2024). Social Transformation in Modern Society: A Literature Review on the Role of Technology in Social Interaction. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 4(1), 82–95. <https://doi.org/10.69989/j0m6cg84>
- Hukuma, S. Y. (2024). *Jl Bubar, BNPT Harap Kelompok Terorisme Lain Menyusul.* Medcom.Id. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/zNPXP5PN-ji-bubar-bnpt-harap-kelompok-terorisme-lain-menyusul>

- IDNTimes. (2020). *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia, Ini 8 Ceritanya*. Idntimes.Com. <https://www.idntimes.com/tech/trend/abraham-herdyanto/sejarah-perkembangan-teknologi-informasi-indonesia>
- Komdigi. (2019). *Kemenkominfo Blokir 1,500 Situs terkait Radikalisme*. Komdigi.Go.Id. <https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/kemenkominfo-blokir-1-500-situs-terkait-radikalisme>
- Komdigi. (2024). *Siaran Pers No. 225/HM/KOMINFO/03/2024 tentang Menkominfo: Kami Sudah Take Down 5.731 Konten Radikalisme*. Komdigi.Go.Id. <https://www.komdigi.go.id/>
- Kuhlthau, C. C. (1994). *Teaching the Library Research Process*. Scarecrow Press.
- KumparanNews. (2017). *Habib Rizieq soal FPI Dilatih TNI: Bela Negara Wajib Dong*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/kumparannews/fpi-dilatih-tni-habib-rizieq-bela-negara-wajib-dong>
- Lawler, E. J., Thye, S. R., & Yoon, J. (2009). *Social commitments in a depersonalized world*. Russell Sage Foundation.
- Lupton, D. (2014). *Digital Sociology*. Routledge.
- Majid, R. A. (2022). *BNPT: 33 Juta Penduduk Indonesia Terpapar Radikalisme, Butuh Undang-Undang Pencegahan*. Kompas.Tv. <https://www.kompas.tv/nasional/311315/bnpt-33-juta-penduduk-indonesia-terpapar-radikalisme-butuh-undang-undang-pencegahan>
- Mandala, I., Witro, D., & Juraidi, J. (2024). Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024: Sebagai Bentuk Upaya Memfilter Konten Radikalisme dan Ekstremisme di Era Disrupsi Digital-Based Religious Moderation Transformation 2024: An Effort to Filter Radicalism and Extremism Content in the Age. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1).
- Markus, M. L., & Nan, W. V. (2020). Theorizing the connections between digital innovations and societal transformation: learning from the case of M-Pesa in Kenya. In *Handbook of digital innovation* (pp. 64–82). Edward Elgar Publishing.
- Maxwell, J. A. (2008). *Designing a Qualitative Study, Vol. 2., The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods*. Sage.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Sage.
- Muda, R. (2023). *Lajnah Muslimah DSKS Gelar Pelatihan 'Emakku Cerdas Media.'* Solotrend.Net. <https://solotrend.net/index.php/2023/05/21/lajnah-muslimah-dsks-gelar-pelatihan-media-bagi-emak-emak/>
- Muharam, M. M., Widodo, B. S., & Wisnu, W. (2023). Islamisme dalam Media Sosial (Studi Perlawanan 'Kelompok Islam 212' Terhadap Pemerintah Pada 2016-2019). *Communicator Sphere*, 3(1), 44–60. <https://doi.org/10.55397/cps.v3i1.37>
- Munandar, A., Esterlita Purnamasari, S., Varadhila Peristianto, S., & Mercu Buana Yogyakarta, U. (2020). Psychological Well-Being Pada Keluarga Broken Home Psychological Well-Being in Broken Family. *Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 22(1), 1693–2552.
- Ni'mah, Z. A. (2022). Pengarusutamaan Moderasi Beragama Melalui Media Sosial Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme Di Kalangan Pelajar Milennial Sita Kota Kediri. *Revorma: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/10.62825/revorma.v2i2.28>
- Parvez, S., & Hastings, J. V. (2022). Understanding the role of digital media in female participation in terrorism: the case of Bangladesh. *Small Wars and Insurgencies*, 33(8), 1345–1371. <https://doi.org/10.1080/09592318.2022.2109371>
- Peckmann, C., Kannen, K., Pensel, M. C., Lux, S., Philipsen, A., & Braun, N. (2022). Virtual reality induces symptoms of depersonalization and derealization: A longitudinal randomised control trial. *Computers in Human Behavior*, 131(January), 107233. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107233>
- Phillips, M. L., Medford, N., Senior, C., Bullmore, E. T., Suckling, J., Brammer, M. J., Andrew, C., Sierra, M., Williams, S. C. R., & David, A. S. (2001). Depersonalization disorder: Thinking without feeling. *Psychiatry Research - Neuroimaging*, 108(3), 145–160. [https://doi.org/10.1016/S0925-4927\(01\)00119-6](https://doi.org/10.1016/S0925-4927(01)00119-6)

- Putra, D. O. Y., Rizieq, H., Rahmadona, T., & Nalinda, E. A. (2024). STUDI FENOMENA LITERATUR: DAMPAK PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME MELALUI MEDIA SOSIAL DAN HUBUNGANNYA TERKAIT NILAI AGAMA PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT MODERAT ISLAMIIYAH DI INDONESIA. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 7(1), 91–100.
- Rahmawati, A., Astuti, D. M., Harun, F. H., & Rofiq, M. K. (2023). Peran Media Sosial Dalam Penguatan Moderasi Beragama Di Kalangan Gen-Z. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 905–920.
- Rhio. (2018). *IMCC: Seseorang yang Kecewa Terhadap Kelompok, Lebih Mudah Dideradikalisasi*. ConveyIndonesia.Com. <https://conveyindonesia.com/id/imcc-seseorang-yang-kecewa-terhadap-kelompok-lebih-mudah-dideradikalisasi/>
- RiauPos. (2017). *Ternyata, Ini Penyebab Teroris Rekrut Anak "Broken Home."* Riaupos.Jawapos.Com. <https://riaupos.jawapos.com/nasional/2253411818/ternyata-ini-penyebab-teroris-rekrut-anak-broken-home>
- Rizkinaswara, L. (2020). *Pemblokiran dan Literasi jadi Langkah Kominfo Cegah Terorisme di Ruang Digital*. Aptika.Kominfo.Go.Id. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/pemblokiran-dan-literasi-jadi-langkah-kominfo-cegah-terorisme-di-ruang-digital/>
- Rizkinaswara, L. (2021). *Kominfo Blokir 20.453 Konten Terorisme Radikalisme di Media Sosial*. Aptika.Kominfo.Go.Id. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/04/kominfo-blokir-20-453-konten-terorisme-radikalisme-di-media-sosial/>
- Sabiq, M., Anwar, S. T., Arisnawawi, Ilyas, S., Muhajir, A., Aksyar, M., Suharsih, M., & Nurfadillah. (2022). *Telaah Kritis Atas Kenyataan Gender, Agama dan Budaya di Indonesia*. Azka Pustaka.
- Sabiq, M., Nawawi, I., & Arisnawawi, A. (2023). CIRCULATION OF PRODUCTION AND FRAMING OF ISLAMIC TERRORISM (CASE STUDY OF THREE CHURCH BOMBINGS IN SURABAYA). *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 8(2), 243–256.
- Saloom, G. (2016). PERSONAL TRANSFORMATION: FROM CRIMINALITY TO PIETY. *Dialog: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keagamaan*, 39(2), 237–252.
- Sandi, M. R. (2023). *Menkominfo Blokir 273 Situs Radikalisme dan Terorisme selama Agustus 2023*. Nasional.Sindonews.Com. <https://nasional.sindonews.com/read/1232989/14/menkominfo-blokir-273-situs-radikalisme-dan-terorisme-selama-agustus-2023-1698041426>
- Saptohutomo, A. P. (2022). *BNPT Tutup 470 Situs dan Akun Bermuatan Radikal Sepanjang 2022*. Nasional.Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/29/11410081/bnpt-tutup-470-situs-dan-akun-bermuatan-radikal-sepanjang-2022>
- Sarlan, A. S. M. (2021). Peran Media Massa Dalam Mencegah Paham Radikalisme Pada Kalangan Remaja Di Sulawesi Tenggara. *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 1(2), 61–83. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v1i2.37>
- Setia, P. (2021). Membumikan Khilafah di Indonesia: Strategi Mobilisasi Opini Publik oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Media Sosial. *Journal of Society and Development*, 1, 33–45. <http://journal.medpro.my.id/index.php/jsd>
- Simarmata, J. (2010). *Rekayasa Web*. Penerbit Andi.
- Sporer, K., & Buxton, B. (2024). The role of family members in the prevention of violent extremism and terrorism: A scoping review of the literature. *Aggression and Violent Behavior*.
- Sucahyo, N. (2021). *Radikalisme, Remaja, dan Internet: Kekerasan yang Ditularkan Melalui Layar*. Voaindonesia.Com. <https://www.voaindonesia.com/a/radikalisme-remaja-dan-internet-kekerasan-yang-ditularkan-melalui-layar/6015385.html>
- Tamrin, S., Idrus, I. I., Mario, & Arisnawawi. (2021). Terrorism Habitus Reproduction in Indonesia (Study of Pierre Bordieu's Thought in Potraying Terror Behavior in Indonesia). *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 10(2), 130–138.
- Tawaang, F., & Mudjiyanto, B. (2021). Mencegah Radikalisme Melalui Media Sosial. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(2), 131–144.
- Tempo. (2023). *Kilas Balik Pembentukan FPI 17 Agustus 1998*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/politik/kilas-balik-pembentukan-fpi-17-agustus-1998-154670>

- UMA. (2022). *Radikalisme di Media Sosial*. Ilmukomunikasi.Uma.Ac.Id. <https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2022/11/17/radikalisme-di-media-sosial/>
- Wahid, A., Destitry, N. A., & Rakhmawati, F. Y. (2020). Radikalisme Di Media Sosial: Penyebutan Dan Konteks Sosial Penggunaannya. *Jurnal InterAct*, 9(1). <https://doi.org/10.25170/interact.v9i1.1711>
- Wibowo, T. K., & Hadiningrat, W. (2022). Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia. *IBLAM Law Review*, 4(2), 187–212. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.304>
- Yuniarto, T. (2021). *Kebijakan Riset dan Teknologi: Dari Soekarno Hingga Jokowi*. Kompaspedia.Kompas.Id. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-riset-dan-teknologi-dari-soekarno-hingga-jokowi>